



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **23** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR
SIPII NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Daerah, perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi, sehingga insentif pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari komponen prestasi kerja tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komponen prestasi kerja tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu diubah untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang berstatus CPNS;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dan atau dari Instansi Induk;
 - f. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi tempat diperbantukan;
 - g. PNS Kabupaten Cilacap yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

- h. Pegawai ASN yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cilacap dan RSUD Majenang;
- i. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan sementara dari jabatannya.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah melakukan Analisis Beban Kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari standar besaran TPP.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap kecuali Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari standar besaran TPP.

5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan TPP tambahan diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target kinerja triwulan tercapai.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) suatu triwulan tidak tercapai, TPP untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan keempat dibayarkan pada triwulan pertama tahun anggaran berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.
- (2) Ketentuan pembayaran TPP untuk ASN pada BLUD UPTD Puskesmas diatur sebagai berikut:
 - a) ASN BLUD UPTD Puskesmas Kampunglaut diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sepanjang tidak mendapatkan jasa pelayanan;
 - b) ASN BLUD UPTD Puskesmas dapat diberikan TPP apabila jasa pelayanan yang diterima tidak melebihi TPP ASN Dinas Kesehatan pada kelas jabatan yang sama dan sepanjang sudah tersedia anggaran.
- (3) Besaran TPP ASN BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari TPP ASN Dinas Kesehatan pada kelas jabatan yang sama.
- (4) Besaran TPP kepada Pegawai ASN dikenakan pajak dan iuran BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan standar besaran TPP dalam Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA Peraturan Bupati ini.

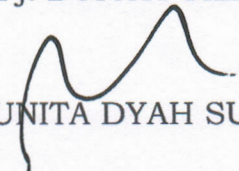
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 AUG 2023

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 OCT 2023.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR

(5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan keempat dibayarkan pada triwulan pertama tahun anggaran berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.
- (2) Ketentuan pembayaran TPP untuk ASN pada BLUD UPTD Puskesmas diatur sebagai berikut:
 - a) ASN BLUD UPTD Puskesmas Kampunglaut diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.
 - b) ASN BLUD UPTD Puskesmas selain BLUD UPTD Puskesmas Kampunglaut dapat diberikan TPP apabila jasa pelayanan yang diterima tidak melebihi TPP ASN Dinas Kesehatan pada kelas jabatan yang sama dan sepanjang sudah tersedia anggaran.
- (3) Besaran TPP ASN BLUD UPTD Puskesmas selain BLUD UPTD Puskesmas Kampunglaut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diberikan paling banyak 15% dari TPP ASN Dinas Kesehatan pada kelas jabatan yang sama.
- (4) Besaran TPP kepada Pegawai ASN dikenakan pajak dan iuran BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan standar besaran TPP dalam Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA Peraturan Bupati ini.

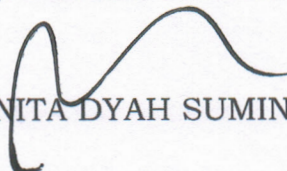
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **4 AUG 2023**

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **9 OCT 2023**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR **23**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 CILACAP

STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TPP/BULAN (Rp.) |
|-----------|--------------------|--|---------------|-------------------------|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIS DAERAH | 15 | 32.961.000 |
| | | ASISTEN SEKDA | 14 | 19.878.000 |
| | | STAF AHLI | 13 | 14.477.000 |
| | | JF PPBJ AHLI MADYA | 11 | 9.946.000 |
| | | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 12 | 12.044.000 |
| | | KEPALA BAGIAN | 12 | 11.576.000 |
| | | JF PPBJ AHLI MUDA | 9 | 8.668.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 6.771.000 |
| | | KASUBAG | 9 | 6.771.000 |
| | | JF PPBJ AHLI PERTAMA | 8 | 7.534.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA | 8 | 5.332.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 4.604.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 4.001.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 3.336.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.494.000 |
| PELAKSANA | 1 | 2.137.000 | | |
| 2 | INSPEKTORAT | INSPEKTUR | 14 | 20.937.000 |
| | | SEKRETARIS INSPEKTORAT | 12 | 11.459.000 |
| | | INSPEKTUR PEMBANTU | 11 | 10.486.000 |
| | | JF AUDITOR/P2UPD AHLI MADYA | 11 | 9.946.000 |
| | | KASUBAG | 9 | 6.703.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 6.703.000 |
| | | JF AUDITOR/P2UPD AHLI MUDA | 9 | 8.668.000 |
| | | JF AUDITOR AHLI PERTAMA/ PENYELIA | 8 | 6.652.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA | 8 | 5.057.000 |
| | | JF AUDITOR MAHIR | 7 | 5.016.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 4.580.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.980.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 3.319.000 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----|------------|
| | | PELAKSANA | 3 | 2.485.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.137.000 |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | SEKRETARIS DPRD | 14 | 12.220.000 |
| | | KEPALA BAGIAN | 11 | 8.678.000 |
| | | KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEPALA PELAKSANA BPBD | 14 | 13.279.000 |
| | | SEKRETARIS BADAN | 12 | 9.354.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 7.322.000 |
| | | KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.540.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.540.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 5.057.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.397.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.877.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.368.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.808.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.468.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.120.000 |
| 5 | DINAS KESEHATAN | KEPALA DINAS | 14 | 13.279.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 9.354.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 7.322.000 |
| | | JF AHLI MADYA | 11 | 6.870.000 |
| | | JF AHLI MUDA - DOKTER | 10 | 6.290.000 |
| | | JF AHLI MUDA -DOKTER- PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 10 | 6.762.000 |
| | | JF AHLI MUDA - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 9 | 5.882.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA - DOKTER - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 9 | 5.882.000 |
| | | KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.540.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.540.000 |
| | | JF AHLI MUDA | 9 | 5.198.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 5.057.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 8 | 4.947.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.397.000 |
| | | JF MAHIR - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 7 | 4.483.000 |
| | | JF AHLI - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 7 | 4.120.000 |
| | | JF MAHIR | 7 | 3.998.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.877.000 |
| | | JF TERAMPIL - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 6 | 4.000.000 |
| | | PELAKSANA - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 6 | 3.789.000 |
| | | JF TERAMPIL | 6 | 3.579.000 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----|------------|
| | | PELAKSANA | 6 | 3.368.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.808.000 |
| | | PELAKSANA - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 3 | 2.640.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.468.000 |
| | | PELAKSANA - PUSKESMAS KAMPUNGLAUT | 1 | 2.232.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.120.000 |
| 6 | DINAS SOSIAL | KEPALA DINAS | 14 | 13.279.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 9.354.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 7.322.000 |
| | | KASUBAG/KASI | 9 | 5.540.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.540.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.397.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.877.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.368.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.808.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.468.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.120.000 |
| 7 | DINAS PERHUBUNGAN | KEPALA DINAS | 14 | 13.279.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 9.354.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 7.322.000 |
| | | KASI//KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.540.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 5.057.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.397.000 |
| | | JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN | 7 | 3.998.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.877.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.368.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.808.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.468.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.120.000 |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | KEPALA SATPOL PP | 14 | 13.279.000 |
| | | SEKRETARIS SATPOL PP | 12 | 9.354.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 7.322.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.540.000 |
| | | JF AHLI MUDA/JF AHLI MADYA | 9 | 5.198.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 5.057.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.397.000 |
| | | JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN | 7 | 3.998.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.877.000 |
| | | JF TERAMPIL | 6 | 3.579.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.368.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.808.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.468.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.120.000 |
| 9 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA/JF AHLI MADYA | 9 | 4.856.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |

| | | | | |
|----|--|---|----|------------|
| | | JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN | 7 | 3.829.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 10 | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | KEPALA DINAS | 14 | 13.279.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 9.354.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 7.322.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.540.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.540.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 5.057.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.397.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.877.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.368.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.808.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.468.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.120.000 |
| 12 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MADYA | 9 | 4.856.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN | 7 | 3.829.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 4.783.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |

| | | | | |
|-----------|---|--|----|------------|
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 14 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 15 | DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 4.783.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| PELAKSANA | 1 | 2.115.000 | | |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 4.783.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| PELAKSANA | 1 | 2.115.000 | | |
| 17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |

| | | | | |
|-----------|---|--|----|------------|
| 18 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD TIPE A | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA | 9 | 4.856.000 |
| | | KEPALA UPTD TIPE B/KASUBAG TU UPTD | 8 | 4.783.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | JF MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN | 7 | 3.829.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 19 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | JF AHLI MADYA - PENEMPATAN KAMPUNGLAUT | 11 | 7.322.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | JF AHLI MADYA | 11 | 6.418.000 |
| | | JF AHLI MUDA - PENEMPATAN KAMPUNGLAUT | 9 | 5.540.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA - JF PENYETARAAN | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA | 9 | 4.856.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA - PENEMPATAN KAMPUNGLAUT | 7 | 4.119.000 |
| | | JF MAHIR | 7 | 3.829.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA - PENEMPATAN KAMPUNGLAUT | 6 | 3.579.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA - PENEMPATAN KAMPUNGLAUT | 5 | 2.984.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| PELAKSANA | 1 | 2.115.000 | | |
| 20 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 4.783.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 21 | DINAS PERTANIAN | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |

| | | | | |
|----|--|--|----|------------|
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA/JF AHLI MADYA | 9 | 4.856.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 4.783.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA - PENEMPATAN KAMPUNGLAUT | 8 | 4.672.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | JF MAHIR | 7 | 3.829.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | JF TERAMPIL - PENEMPATAN KAMPUNGLAUT | 6 | 3.706.000 |
| | | JF TERAMPIL | 6 | 3.285.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 22 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 23 | DINAS PERIKANAN | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | KASUBAG TU UPTD | 8 | 4.783.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 24 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG/KEPALA UPTD | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |

| | | | | |
|----|--|--|----|------------|
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | KEPALA DINAS | 14 | 12.220.000 |
| | | SEKRETARIS DINAS | 12 | 8.770.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 6.870.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 5.198.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | 4.123.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 26 | KECAMATAN ADIPALA | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 27 | KECAMATAN BANTARSARI | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 28 | KECAMATAN BINANGUN | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 29 | KECAMATAN CILACAP SELATAN | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | LURAH | 9 | 5.882.000 |
| | | KASI/KASUBAG KECAMATAN | 9 | 5.198.000 |
| | | KASI/SEKRETARIS KELURAHAN | 8 | 4.783.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 30 | KECAMATAN CILACAP TENGAH | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | LURAH KUTAWARU | 9 | 6.566.000 |
| | | LURAH | 9 | 5.882.000 |
| | | KASI/KASUBAG KECAMATAN | 9 | 5.198.000 |
| | | KASI/SEKRETARIS KELURAHAN KUTAWARU | 8 | 5.332.000 |
| | | KASI/SEKRETARIS KELURAHAN | 8 | 4.783.000 |

| | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|----|------------|
| | | PELAKSANA-PENEMPATAN KUTAWARU | 7 | 4.119.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA-PENEMPATAN KUTAWARU | 6 | 3.573.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA-PENEMPATAN KUTAWARU | 5 | 2.984.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA-PENEMPATAN KUTAWARU | 3 | 2.631.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA-PENEMPATAN KUTAWARU | 1 | 2.238.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 31 | KECAMATAN CILACAP UTARA | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | LURAH | 9 | 5.882.000 |
| | | KASI/KASUBAG KECAMATAN | 9 | 5.198.000 |
| | | KASI/SEKRETARIS KELURAHAN | 8 | 4.783.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 32 | KECAMATAN CIMANGGU | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 33 | KECAMATAN CIPARI | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 34 | KECAMATAN DAYEUHLUHUR | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 35 | KECAMATAN GANDRUNGMANGU | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |

| | | | | |
|----|------------------------|------------------|----|------------|
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 36 | KECAMATAN JERUKLEGI | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 37 | KECAMATAN KAMPUNGLAUT | CAMAT | 12 | 11.225.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 8.000.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.882.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 4.119.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.573.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.984.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.631.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.238.000 |
| 38 | KECAMATAN KARANGPUCUNG | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 39 | KECAMATAN KAWUNGANTEN | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 40 | KECAMATAN KEDUNGREJA | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 41 | KECAMATAN KESUGIHAN | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 42 | KECAMATAN KROYA | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |

| | | | | |
|----|---------------------|------------------|----|------------|
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 43 | KECAMATAN MAJENANG | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 44 | KECAMATAN MAOS | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 45 | KECAMATAN NUSAWUNGU | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 46 | KECAMATAN PATIMUAN | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 47 | KECAMATAN SAMPANG | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 48 | KECAMATAN SIDAREJA | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------|
| 49 | KECAMATAN WANAREJA | CAMAT | 12 | 10.056.000 |
| | | SEKRETARIS CAMAT | 11 | 7.096.000 |
| | | KASI/KASUBAG | 9 | 5.198.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 3.635.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.158.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 2.633.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.459.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.115.000 |
| 50 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | KEPALA BADAN | 14 | 15.886.000 |
| | | SEKRETARIS BADAN | 12 | 11.401.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 8.750.000 |
| | | KASUBAG | 9 | 6.669.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 6.669.000 |
| | | JF AHLI MUDA | 9 | 6.327.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA | 8 | 5.167.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 4.555.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.959.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 3.301.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.477.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.126.000 |
| | | 51 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | KEPALA BADAN |
| SEKRETARIS BADAN | 12 | | | 8.770.000 |
| KEPALA BIDANG | 11 | | | 6.870.000 |
| KASUBAG | 9 | | | 5.198.000 |
| JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | | | 5.198.000 |
| JF AHLI PERTAMA/JF PENYELIA | 8 | | | 4.123.000 |
| PELAKSANA | 7 | | | 3.635.000 |
| PELAKSANA | 6 | | | 3.158.000 |
| PELAKSANA | 5 | | | 2.633.000 |
| PELAKSANA | 3 | | | 2.459.000 |
| PELAKSANA | 1 | | | 2.115.000 |
| 52 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KEPALA BADAN | 14 | 15.886.000 |
| | | SEKRETARIS BADAN | 12 | 11.401.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 8.750.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 6.669.000 |
| | | KASUBAG | 9 | 6.669.000 |
| | | JF AHLI MUDA | 9 | 6.327.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA | 8 | 5.167.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 4.555.000 |
| | | PELAKSANA | 6 | 3.959.000 |
| | | PELAKSANA | 5 | 3.301.000 |
| | | PELAKSANA | 3 | 2.477.000 |
| | | PELAKSANA | 1 | 2.126.000 |
| 53 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | KEPALA BADAN | 14 | 15.886.000 |
| | | SEKRETARIS BADAN | 12 | 11.401.000 |
| | | KEPALA BIDANG | 11 | 8.750.000 |
| | | JF AHLI MUDA (Hasil Penyetaraan Jabatan) | 9 | 6.669.000 |
| | | KASUBAG | 9 | 6.669.000 |
| | | JF AHLI MUDA | 9 | 6.327.000 |
| | | JF AHLI PERTAMA | 8 | 5.167.000 |
| | | PELAKSANA | 7 | 4.555.000 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| | PELAKSANA | 6 | 3.959.000 |
| | PELAKSANA | 5 | 3.301.000 |
| | PELAKSANA | 3 | 2.477.000 |
| | PELAKSANA | 1 | 2.126.000 |

Pj. BUPATI CILACAP,



YUNITA DYAH SUMINAR

LAMPIRAN IA
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **23** TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP

STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI SEKRETARIS
DAERAH DAN PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEBAGAI KONVERSI UPAH PUNGUT PAJAK

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN (Rp.) |
|----|----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | SEKRETARIS DAERAH | 15 | 36.000.000 |
| | KEPALA BADAN | 14 | 32.000.000 |
| | SEKRETARIS BADAN | 12 | 20.000.000 |
| | KEPALA BIDANG | 12 | 14.500.000 |
| | KASUBAG / JF AHLI MUDA / KASUBID | 9 | 10.500.000 |
| | PELAKSANA | 7 | 6.500.000 |
| | PELAKSANA | 6 | 6.000.000 |
| | PELAKSANA | 5 | 5.500.000 |
| | PELAKSANA | 3 | 4.500.000 |

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNKITA DYAH SUMINAR